



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raya Kota Gajah – Gunung Sugih Telp. (0725) 529945, Fax
(0725) 52996 Kode Pos 34161

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 800/19/KPTS/SETWAN.IV.1/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG

TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang: a. bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-OPD) memuat arah kebijakan Organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
b. bahwa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
- i. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- Kedua : RencanaKerja(Renja)Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yangselanjutnya disebut Renja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran RENSTRA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- Ketiga : Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Keempat

Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih,
Pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. ICHSAN, M.Si

NIP. 19760124 199511 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Gunung Sugih, 2 Januari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. ICHSAN, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19760124 199511 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 Bab II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	 23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
 Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	31
3.3. Program dan Kegiatan	33
 Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 37
 Bab V. PENUTUP.....	 57

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja OPD setiap Tahunnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD.

RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dan Renstra DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Oleh karena itu secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi , validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.
13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016– 2021
15. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD. Disamping itu penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi Misi dan Program serta Tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir Tahun Anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini, antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
4. Menjadi acuan kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh OPD.

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2024 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT

DPRD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 di tuangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun 2023.

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Belanja operasi

Belanja operasi adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa **Rp.79.101.048.476,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 70.395.865.067,-** atau **89 %**.

b. Belanja modal

Belanja modal adalah belanja yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar **Rp. 635.012.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 538.860.000,-** atau **88%.**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 (Delapan) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
Dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. LAMPUNG TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) sampai Tahun 2019	Realisasi Target Hasil Program dan Kkeluara n Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n- 2)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Proram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(110/4)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Berlaku								

		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti								
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin								
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik								
		Prosentase Fasilitas Kesejahteraan Anggota DPRD								
		Prosentase Fasilitas Penyediaan Administrasi DPRD								
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	

4.02.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	
4.02.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	-	-	12 bulan	12 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
4.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	770 Org/bulan	770 Org/bulan	-	648 org/Bulan	648 org/Bulan	
4.02.01.2.0 2.07	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	
4.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang telah	-	-	52 Orang	52 Orang	-	48 Orang	48 Orang	

	Perangkat Daerah	melengkapi berkas kepegawaiannya								
4.02.01.2.0 5.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	24 org	24 org	-	48 Orang	48 Orang	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	48 Orang	48 Orang	
4.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
4.02.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	6 Paket	6 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
4.02.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	

4.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	4 Paket	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
4.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	6 jenis	6 jenis	-	1 Paket	1 Paket	
4.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
4.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6 Laporan	6 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	-	10 Unit	10 Unit	
4.02.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	-	10 Unit	10 Unit	

4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat Pemeliharaan	-	-	117 Unit	117 Unit	-	117 Unit	117 Unit	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	22 Unit	22 unit	-	31 Unit	31 Unit	

4.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi	-	-	8 unit	8 unit	-	2 Unit	2 Unit	
4.02.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Rehabilitasi	-	-	87 unit	87 unit	-	7 Unit	7 Unit	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD	-	-	50 Orang	50 orang	-	50 Orang	50 Orang	
4.02.01.2.1 5.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	-	-	4 Paket	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	
4.02.01.2.1 5.03	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	-	-	50 orang	50 orang	-	50 Orang	50 Orang	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Fasilitas Administrasi DPRD	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
4.02.01.2.1 6	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	24 Laporan	24 Laporan	-	30 Laporan	30 Laporan	

4.02.01.2.1 6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	-	-	4 Paket	4 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD	-	-			-			
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah								
		Persentase Pembahasan Raperda								
		Persentase Pembahasan Produk Hukum Non Perkada								
		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran								

4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang ditetapkan	-	-	13 Raperda	13 Raperda	-	11 Raperda	11 Raperda	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undang	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Anggaran yang disepakati tepat waktu	-	-	6 dokumen	6 dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	1 dokuemn	1 dokuemn	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	

	PPAS	Perubahan PPAS								
4.02.02.2.0 2.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.0 2.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.0 2.06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan disampaikan kepada kepala daerah	-	-	90 dokumen	90 dokumen	-	90 Dokumen	90 Dokumen	
4.02.02.03. 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.02.03. 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	

	Infrastruktur	Bidang Infrastruktur								
4.02.02.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.02.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.02.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	15 Laporan	15 Laporan	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.02.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	12 Dokumen	15 Dokumen	-	15 Laporan	15 Laporan	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	-	-	50 Orang	50 Orang	-	12 Bulan	12 Bulan	

4.02.02.2.0 4.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	-	30 Dokumen	30 Dokumen	-	50 Dokumen	50 Dokumen	
4.02.02.2.0 4.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-	-	1.210 Dokumen	1.210 Dokumen	-	25 Dokumen	25 Dokumen	
4.02.02.2.0 4.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen o	-	14 Orang	14 Orang	
4.02.02.2.0 4.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	-	8 Orang	8 Orang	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Reses yang diakomodir dan disalurkan kepada yang berwenang	-	-	3 Tahap	3 Tahap	-	3 Tahap	3 Tahap	
4.02.02.2.0 5.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
4.02.02.2.0 5.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kode Etik	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	

4.02.02.2.0 6.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang dibahas	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	
4.02.02.2.0 7.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
4.02.02.2.0 8.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			12 Dokumen	12 Dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	
4.02.02.2.0 8.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			20 Dokumen	20 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 3 (tiga) Wakil Ketua dan alat kelengkapan dewan seperti Komisi-komisi yaitu: I,II,III,IV , Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan juga memfasilitasi Fraksi-fraksi sebanyak 7 (Tujuh) Fraksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Demokrat Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrasi.

Berdasarkan analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah :

- a. Meningkatkan Profesionalisme Anggota DPRD, Fraksi-fraksi DPRD dibantu oleh tenaga ahli / Tim Ahli Fraksi yang bersifat regular (tetap) sedangkan kelompok pakar atau tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang atau kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Badan Musyawarah,Badan anggaran dan alat kelengkapan DPRD lainnya ,Pansus –pansus yang dibentuk bersifat tidak tetap.
- b. Meningkatkan kinerja fasilitasi pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya fasilitasi Publikasi dan Pemberitaan, Hearing/ dialog dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh masyarakat, Tokoh agama.

- c. Meningkatnya kemampuan Pendidikan Formal SDM Anggota Dewan dan Aparatur Sekretariat DPRD melalui Diklat / Bimtek, sosialisasi dan orientasi.
- d. Meningkatnya Kemampuan SDM anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD dengan study komperatif untuk memfasilitasi konsultasi,koordinasi dan study banding baik ke lembaga DPRD Propinsi lainnya atau ke Departemen / lembaga yang berkaitan dengan kajian dan pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), dan kunjungan kerja ke Kabupaten/kota dalam Propinsi Lampung atau lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan lainnya juga melaksanakan kegiatan Reses ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
- e. Meningkatnya peran legislasi yang dibutuhkan masyarakat dengan target kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Legislasi Daerah melalui Pembahasan rancangan Peraturan daerah dan Pansus Lainnya serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan.

Pencapaian keberhasilan peningkatan peran legislasi melalui pertemuan/ rapat kerja, jumlah Peraturan daerah yang dibahas, rapat paripurna yang dilaksanakan sehingga menghasilkan kebijakan, kesepakatan dan keputusan.

Dalam capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

- 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD yaitu 85 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD dengan target 85 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	Hasil survey tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.	83	85	85	90	85	85	85	85	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka Visi yang ingin dicapai atau diwujudkan yaitu “ Terwujudnya Administrasi yang tertib dan efisien dalam rangka pelayanan prima di Sekretariat DPRD ”Sejalan dengan visi tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagaiberikut :

1. Struktur organisasi, Jumlah Pegawai, sarana dan porasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional, Sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan Partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

5. Visi dan misi kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam RPJMD akan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program – program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang di tetapkan.

Tabel T-C 31

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah

NO.	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana
1	2		3	5	6	2		3	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	100%	49.795.443.719	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	100%	49.795.443.719
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti					Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti		
			Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin					Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin		
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik		
			Prosentase Fasilitas Kesejahteraan Anggota DPRD					Prosentase Fasilitas Kesejahteraan Anggota DPRD		
			Prosentase Fasilitas Penyediaan Administrasi DPRD					Prosentase Fasilitas Penyediaan Administrasi DPRD		
1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	10 Dokumen	60.360.900	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	10 Dokumen	60.360.900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	35.901.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	35.901.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24.459.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24.459.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Pendapatan ASN yang diterima	12 Bulan	6.335.897.966	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Pendapatan ASN yang diterima	12 Bulan	6.335.897.966
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648 org/bln	5.613.863.866	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648 org/bln	5.613.863.866

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	'Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran/penerimaan dll	12 Dokumen	662.894.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	'Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran/penerimaan dll	12 Dokumen	662.894.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	3 Laporam	59.140.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	3 Laporam	59.140.100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	48 Orangg	456.105.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	48 Orangg	456.105.500
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	456.105.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	456.105.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	12 Bulan	4.806.570.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	12 Bulan	4.806.570.200
	Penyediaana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.327.400	Penyediaana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.327.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	603.545.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	603.545.000
	Penyediaana Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	113.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	113.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	188.023.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	188.023.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	145.890.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	145.890.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.200.945.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.200.945.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.502.839.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.502.839.500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan (Jumlah total seluruh pengadaan Barang yang menjadi aset daerah pada perangkat daerah)	2 Unit	1.038.531.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan (Jumlah total seluruh pengadaan Barang yang menjadi aset daerah pada perangkat daerah)	2 Unit	1.038.531.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.038.531.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.038.531.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	1.894.816.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	1.894.816.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.566.816.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.566.816.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Sekretariat DPRD	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan (Jumlah total seluruh aset yang mendapat pemeliharaan)	117 Unit	1.460.710.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Sekretariat DPRD	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan (Jumlah total seluruh aset yang mendapat pemeliharaan)	117 Unit	1.460.710.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	599.930.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	599.930.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	771.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	771.250.000
	Peemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	89.530.000	Peemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	89.530.000
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah DPRD yang terlayani	50 Orang	31.938.222.153	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah DPRD yang terlayani	50 Orang	31.938.222.153
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 org/ bln	30.919.822.153	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 org/ bln	30.919.822.153
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	910.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	910.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50 orang	108.400.000	Pelaksanaan Medical Check Up	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50 orang	108.400.000
9	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitas Kebutuhan DPRD	12 Bulan	804.230.000	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitas Kebutuhan DPRD	12 Bulan	804.230.000
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	382.950.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	382.950.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	421.280.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	421.280.000
B	Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Aparatur Sekretariat DPRD		33.794.174.400	Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Aparatur Sekretariat DPRD		33.794.174.400
			Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah					Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah		
			Persentase Pembahasan Raperda					Persentase Pembahasan Raperda		
			Persentase Pembahasan Produk Hukum Non Perkada					Persentase Pembahasan Produk Hukum Non Perkada		
			Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran					Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		

1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah perda yang disahkan	11 Raperda	5.146.090.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah perda yang disahkan	11 Raperda	5.146.090.000
	Penyusunan dan Pembahasan Program Ppembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7 Dokumen	2.740.889.300	Penyusunan dan Pembahasan Program Ppembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7 Dokumen	2.740.889.300
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1.536.781.800	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1.536.781.800
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangann	7 Dokumen	350.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangann	7 Dokumen	350.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	50.000.000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	468.418.900	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	468.418.900
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggaran yang disahkan	7 Dokumen	1.135.320.100	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggaran yang disahkan	7 Dokumen	1.135.320.100
	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	50.977.500	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	50.977.500
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	48.682.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	48.682.500
	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	99.446.200	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	99.446.200
	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	104.029.700	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	104.029.700
	Pembahsan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	832.184.200	Pembahsan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	832.184.200
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Urusan Pemerintah yang diawasi	90 Dokumen	1.200.245.200	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Urusan Pemerintah yang diawasi	90 Dokumen	1.200.245.200
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	53.881.800	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	53.881.800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Insfrakstruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	45.705.800	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Insfrakstruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	45.705.800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	68.331.800	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	68.331.800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	45.655.800	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	45.655.800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	45.600.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	45.600.000

	Pengawasan Pengguna Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	15 Laporan	941.070.000	Pengawasan Pengguna Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	15 Laporan	941.070.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	12 Bulan	12.550.478.500	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	12 Bulan	12.550.478.500
	<i>Orientasi DPRD</i>	Sekretariat DPRD	Jumlag Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	50 Dokumen	517.000.000	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlag Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	50 Dokumen	517.000.000
	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	3.483.912.500	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	3.483.912.500
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	14 Orang	504.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	14 Orang	504.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	288.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	288.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	25 Dokumen	7.757.566.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	25 Dokumen	7.757.566.000
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Aspirasi Masyarakat	3 Tahap	470.586.400	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Aspirasi Masyarakat	3 Tahap	470.586.400
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	22.491.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	22.491.000
	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	448.095.400	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	448.095.400
6	Pembahasan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	1 Kegiatan	283.637.000	Pembahasan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	1 Kegiatan	283.637.000
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	283.637.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	283.637.000
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Kerja Sama yang dilaksanakan	1 Kegiatan	163.976.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Kerja Sama yang dilaksanakan	1 Kegiatan	163.976.000
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	163.976.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	163.976.000
8	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan	12 Bulan	12.843.841.200	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan	12 Bulan	12.843.841.200
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	12.344.721.600	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	12.344.721.600
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	499.119.600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	499.119.600
	TOTAL				82.589.618.119	TOTAL				82.589.618.119

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah baik secara langsung maupun usulan masyarakat yang didapatkan dalam kegiatan Reses anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah Dapil masing-masing anggota DPRD. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat atau hearing dan hasilnya disampaikan kepada OPD dan Bupati Lampung Tengah.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024
Kabupaten Lampung Tengah

Sekretariat DPRD Lampung Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Proses pembangunan Lima Tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah terpilih periode 2021 – 2026 telah menetapkan Visi yaitu “ **Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya**”

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional serta tema pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan melalui program-program yang di tuangkan dalam rencana kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Administrasi yang tertib dan efisien dalam rangka pelayanan prima di lingkungan sekretariat DPRD”.

Sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi tersebut sebagai berikut :

- 1) Menyusun konsep penataan administrasi dan organisasi, kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan urusan rumah tangga DPRD yang tertib, teratur dan Efisien.
- 2) Membina dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan personil khususnya dalam pengelolaan administrasi.
- 3) Menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab personil terhadap tugas-tugas di lembaga DPRD
- 4) Melakukan upaya dan langkah-langkah dalam rangka melengkapi sarana dan fasilitas DPRD dan Sekretariat untuk mendukung kegiatan administrasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemampuan daerah.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi-komisi panitia-panitia maupun fraksi DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPRD antara lain persidangan,rapat-rapat dan perumusan kebijaksanaan Dewan.

Tujuan Renja Sekretariat DPRD :

Mengacu pada Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026, maka Tujuan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, sebagai berikut

- Meningkatnya Sinergisitas Legislatif.

Sasaran Renja Sekretariat DPRD :

Mengacu pada Sasaran Rencana Strategi (Renstra-SKPD) Sekretariat DPRD tahun 2021-2026, maka Sasaran Rencana Kerja (Renja-OPD) tahun 2024, sebagai berikut :

- ~ Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Anggota DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 9. Layanan Administrasi DPRD
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Orientasi DPRD

- b. Pendalaman Tugas DPRD
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
 - b. Pelaksanaan Reses
- 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
- 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8. Fasilitasi Tugas DPRD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Sinergisitas Legislatif	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan anggota DPRD	Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80	83	85	90	90

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

Untuk mengoperasikan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk kurun waktu tahun 2021-2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD

- d. Pembahasan APBD Perubahan
- e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Orientasi DPRD
 - b. Pendalaman Tugas DPRD
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - d. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
 - b. Pelaksanaan Reses
- 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
- 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 8. Fasilitasi Tugas DPRD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam langkah pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung

Tengah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4.2.1

PROGRAM	KEGIATAN		SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
		Penyediaaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	APBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	APBD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	APBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
		Peemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	APBD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	APBD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	APBD
		Pelaksanaan Medical Check Up	APBD
		Layanan Administrasi DPRD	APBD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	APBD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	APBD
PROGRAM PENDUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	APBD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	APBD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	APBD
		Fasilitasi Penyusunan Penyeselan /Keterangan Naskah Akademik	APBD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	APBD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	APBD
		Pembahasan KUA dan PPAS	APBD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD
		Pembahasan APBD	APBD
		Pembahasan APBD Perubahan	APBD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	APBD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	APBD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	APBD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	APBD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan	APBD

		Bidang Sumber Daya Alam	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	APBD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	APBD
		Orientasi DPRD	APBD
		Pendalaman Tugas DPRD	APBD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	APBD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	APBD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	APBD
		Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat	APBD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	APBD
		Pelaksanaan Reses	APBD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	APBD
		Penyusunan Kode Etik DPRD	APBD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	APBD
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	APBD
		Fasilitas Tugas DPRD	APBD
		Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	APBD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	APBD

Program untuk mendukung kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan dari misi adalah :

Tabel 4.2.2

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Kode Rek.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sumber Dana
1	2	3	4
	Belanja Langsung		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	APBD
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	
		Prosentase Fasilitasi Kesejahteraan Anggota DPRD	
		Prosentase Fasilitasi Penyediaan Administrasi DPRD	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	APBD
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD

4.02.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan ASN yang diterima	APBD
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran/penerimaan dll	APBD
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	APBD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	APBD
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	APBD
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	APBD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	APBD

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan (Jumlah total seluruh pengadaan Barang yang menjadi aset daerah pada perangkat daerah)	APBD
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	APBD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan (Jumlah total seluruh aset yang mendapat pemeliharaan)	APBD
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	APBD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	APBD
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	APBD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah DPRD yang terlayani	APBD
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	APBD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	APBD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Fasilitas Kebutuhan DPRD	APBD

4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	APBD
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	APBD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Aparatur Sekretariat DPRD	APBD
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	APBD
		Persentase Pembahasan Raperda	APBD
		Persentase Pembahasan Produk Hukum Non Perkada	APBD
		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	APBD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang disahkan	APBD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	APBD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	APBD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangann	APBD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang difasilitasi	APBD
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Anggaran yang disahkan	APBD
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	APBD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	APBD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	APBD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	APBD

		Pertanggungjawaban APBD	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Urusan Pemerintah yang diawasi	APBD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	APBD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	APBD
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	APBD
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	APBD
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	APBD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	APBD
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlag Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	APBD
4.02.02.2.04.0003	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	APBD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	APBD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	APBD
4.02.02.2.05	Penyediaan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat	APBD
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	APBD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	APBD
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	APBD
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	APBD
4.02.02.2.07	Pembasahan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang dilaksanakan	APBD
4.02.02.2.07.0001	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan	APBD

		Publikasi yang Disusun	
4.02.02.2.08	Fasilitasi DPRD	<i>Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan</i>	APBD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	APBD
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	APBD

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dan a Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</i>	Sekretariat DPRD	100%	48.795.443.719	APBD	-	100%	48.795.443.719
		<i>Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti</i>							
		<i>Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin</i>							
		<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik</i>							
		<i>Prosentase Fasilitasi Kesejahteraan Anggota DPRD</i>							
		<i>Prosentase Fasilitasi Penyediaan Administrasi DPRD</i>							

4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat DPRD	10 Dokumen	60.360.900	APBD	-	10 Dokumen	60.360.900
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	35.901.000	APBD	-	7 Dokumen	35.901.000
4.02.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	3 Laporan	24.459.900	APBD	-	3 Laporan	24.459.900
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan ASN yang diterima	Sekretariat DPRD	12 Bulan	6.335.897.966	APBD	-	12 Bulan	6.335.897.966
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	648 org/bln	5.613.863.866	APBD	-	648 org/bln	5.613.863.866
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	'Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran/penerimaan dll	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	662.894.000	APBD	-	12 Dokumen	662.894.000
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	Sekretariat DPRD	3 Laporam	59.140.100	APBD	-	3 Laporam	59.140.100
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	Sekretariat DPRD	48 Orangg	456.105.500	APBD	-	48 Orangg	456.105.500

4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	48 Orang	456.105.500	APBD	-	48 Orang	456.105.500
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Sekretariat DPRD	12 Bulan	4.806.570.200	APBD	-	12 Bulan	4.966.570.200
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	52.327.400	APBD	-	1 Paket	52.327.400
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	603.545.000	APBD	-	1 Paket	603.545.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	113.000.000		-	1 Paket	113.000.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	188.023.300	APBD	-	1 Paket	188.023.300
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	145.890.000	APBD	-	1 Paket	145.890.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan		3 Dokumen	2.200.945.000		-	3 Dokumen	2.200.945.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	15 Laporan	1.502.839.500	APBD	-	15 Laporan	1.662.839.500

4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan (Jumlah total seluruh pengadaan Barang yang menjadi aset daerah pada perangkat daerah)	Sekretariat DPRD	2 Unit	1.038.531.000	APBD	-	2 Unit	1.038.531.000
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 Unit	1.038.531.000	APBD	-	2 Unit	1.038.531.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Sekretariat DPRD	12 Bulan	1.894.816.000	APBD	-	12 Bulan	1.894.816.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	328.000.000	APBD	-	12 Laporan	328.000.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.566.816.000	APBD	-	12 Laporan	1.566.816.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan (Jumlah total seluruh aset yang mendapat pemeliharaan)	Sekretariat DPRD	117 Unit	1.460.710.000	APBD	-	117 Unit	1.460.710.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	33 Unit	599.930.000	APBD	-	33 Unit	599.930.000

4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	2 Unit	771.250.000	APBD	-	2 Unit	771.250.000
4.02.01.2.09.10	Peemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	75 Unit	89.530.000	APBD	-	75 Unit	89.530.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah DPRD yang terlayani	Sekretariat DPRD	50 Orang	31.938.222.153	APBD	-	50 Orang	31.778.222.153
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orgng/bln	30.919.822.153	APBD	-	50 org/bln	30.919.822.153
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	5 Paket	910.000.000	APBD	-	4 Paket	750.000.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Sekretariat DPRD	50 orang	108.400.000	APBD	-	50 orang	108.400.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Fasilitas Kebutuhan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	804.230.000	APBD	-	12 Bulan	804.230.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	30 Laporan	382.950.000	APBD	-	30 Laporan	382.950.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	421.280.000	APBD	-	1 Paket	421.280.000

4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pimpinan Dan Anggota DPRD Dan Aparatur Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		33.794.174.400	APBD	100 %		33.794.174.400
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah							
		Persentase Pembahasan Raperda							
		Persentase Pembahasan Produk Hukum Non Perkada							
		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah perda yang disahkan	Sekretariat DPRD	11 Raperda	5.146.090.000	APBD	-	11 Raperda	5.146.090.000
4.02.02.2.01.000 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	2.740.889.300	APBD	-	7 Dokumen	2.740.889.300
4.02.02.2.01.000 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	1.536.781.800	APBD	-	4 Dokumen	1.536.781.800
4.02.02.2.01.000 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	350.000.000	APBD	-	7 Dokumen	350.000.000
4.02.02.2.01.000 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	50.000.000

4.02.02.2.01.000 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun		1 Dokumen	468.418.900	APBD	-	1 Dokumen	468.418.900
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Anggaran yang disahkan	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	1.135.320.000	APBD	-	7 Dokumen	1.135.320.000
4.02.02.2.02.000 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	50.977.500	APBD	-	2 Dokumen	50.977.500
4.02.02.2.02.000 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	48.682.500	APBD	-	2 Dokumen	48.682.500
4.02.02.2.02.000 3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	99.446.200	APBD	-	1 Dokumen	99.446.200
4.02.02.2.02.000 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	104.029.700	APBD	-	1 Dokumen	104.029.700
4.02.02.2.02.000 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	832.184.200	APBD	-	1 Dokumen	832.184.200
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Urusan Pemerintah yang diawasi	Sekretariat DPRD	90 Dokumen	1.200.245.200	APBD	-	90 Dokumen	1.200.245.200
4.02.02.2.03.000 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	15 Laporan	53.881.800	APBD	-	15 Laporan	53.881.800

4.02.02.2.03.000 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Insfrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	15 Laporan	45.705.800	APBD	-	15 Laporan	45.705.800
4.02.02.2.03.000 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	15 Laporan	68.331.800	APBD	-	15 Laporan	68.331.800
4.02.02.2.03.000 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	15 Laporan	45.655.800	APBD	-	15 Laporan	45.655.800
4.02.02.2.03.000 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	15 Laporan	45.600.000	APBD	-	15 Laporan	45.600.000
4.02.02.2.03.000 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	15 Laporan	941.070.000	APBD	-	15 Laporan	941.070.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	12.550.478.500	APBD	-	12 Bulan	12.550.478.500
4.02.02.2.04.000 1	Orientasi DPRD	Jumlag Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		50 Dokumen	517.000.000	APBD	-	50 Dokumen	-
4.02.02.2.04.000 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	50 Dokumen	3.483.912.500	APBD	-	50 Dokumen	4.000.912.500
4.02.02.2.04.000 3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	14 Orang	504.000.000	APBD	-	14 Orang	504.000.000
4.02.02.2.04.000 4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	8 Orang	288.000.000	APBD	-	8 Orang	288.000.000
4.02.02.2.04.000 8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	25 Dokumen	7.757.566.000	APBD	-	25 Dokumen	7.757.566.000

4.02.02.2.05	Penyediaan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	3 Tahap	470.586.400	APBD	-	3 Tahap	470.586.400
4.02.02.2.05.000 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	22.491.000	APBD	-	3 Dokumen	22.491.000
4.02.02.2.05.000 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	448.095.400	APBD	-	3 Dokumen	448.095.400
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	283.637.000	APBD	-	1 Kegiatan	283.637.000
4.02.02.2.06.000 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	283.637.000	APBD	-	1 Laporan	283.637.000
4.02.02.2.07	Pembasahan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	163.976.000	APBD	-	1 Kegiatan	163.976.000
4.02.02.2.07.000 1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	163.976.000	APBD	-	2 Dokumen	163.976.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	12.843.841.200	APBD	-	12 Bulan	12.843.841.200
4.02.02.2.08.000 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	24 Dokumen	12.344.721.600	APBD	-	24 Dokumen	12.344.721.600
4.02.02.2.08.000 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	499.119.600	APBD		12 Dokumen	499.119.600
JUMLAH					82.589.618.119	JUMLAH			82.589.618.119

B A B V

PENUTUP

RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Oleh karena itu secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi Dokumen Renja Sekretariat DPRD.

Demikian RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan yang harus dipenuhi oleh Instansi pemerintah.

Gunung Sugih, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. ICHSAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19760124 199511 1 001